

Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman Operator SIMAK BMN Mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara

Lolli Adriani¹, Suhairi²

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

*Corresponding Author, lolliadriani@gmail.com

Abstract : This study aims to measure the understanding of SIMAK BMN operators regarding the administration of state property in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Sumatra according to PMK No. 181/PMK.06/2016, the factors that influence the understanding of BMN operators on BMN Administration, and analyze the problems administration of BMN at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Sumatera. There are five factors studied, namely Gender, Age, Education Level, Work Period, and Total Training. The research sample was 32 respondents using primary data in the form of questionnaires. The results showed that the operator's overall understanding was in the understanding category with a score of 20.125 and only the age factor that influenced the BMN operator's understanding of BMN administration.

Keywords : Operator, Administration



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengawali reformasi dalam bidang keuangan, dimana dengan lahirnya aturan tersebut tuntutan terhadap pengelolaan keuangan negara secara tertib, efektif dan efisien, terjangkau, jelas, dan akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dapat terlaksana (Indarwati, 2019). Perubahan akuntansi kas ke dalam sistem basis akrual diharapkan bisa meningkatkan kejelasan dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara dan mengikuti *international best practices* yang telah diselaraskan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia (Rizky, 2019). Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan membantu terwujudnya *good governance* yang diselenggarakan secara baik, bersih, partisipatif, serta akuntabilitas yang memiliki kredibilitas.

Sistem pengelolaan keuangan negara telah bereformasi menuju era yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Reformasi ini ditandai dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberi amanah kepada setiap instansi yang berada pada lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah wajib membuat laporan keuangan kepada DPR/D (Santoso, 2008). Evolusi pelayanan publik dalam rangka meningkatnya ekspektasi publik telah menimbulkan tekanan-tekanan untuk perubahan substantif dalam hal pengelolaan keuangan negara dan layanan publik (Ngwira, Parsa, dan Manase, 2012). Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan membantu terwujudnya *good governance* yang

diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif, serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas.

Aplikasi SIMAK BMN pada prinsipnya adalah penerimaan sebuah informasi meliputi pengadaan barang dan manajemen barang milik negara (BMN) serta penyusunan laporan atas kegiatan tersebut. Harapan Pemerintah dengan adanya software SIMAK BMN ini dapat berperan dalam pencapaian kinerja pada setiap lembaga pemerintahan dalam hal penatausahaan BMN (Sabario, 2017). Di dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa Barang Milik Negara merupakan keseluruhan barang yang dibeli atau didapatkan berdasarkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau diperoleh dari pendapatan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara mulai dari pembuatan rencana kebutuhan, pemakaian, pendayagunaan, pemindahtanganan, penjualan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. Penatausahaan yaitu segala siklus kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penatausahaan BMN dalam mewujudkan tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Hasil penatausahaan berupa laporan BMN yaitu laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik Negara per Kementerian/Lembaga atau Laporan Barang Pengguna, secara semester dan tahunan.

Kaganova dan McKellar (2006) menekankan bahwa banyak pemerintah daerah di seluruh dunia yang merupakan pemilik aset terbesar dari segi kuantitas dan nilai dibandingkan dengan lembaga atau korporasi apapun di wilayahnya masing-masing sehingga penatausahaan aset pemerintah ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dipandang kecil. Penatausahaan BMN menjadi semakin penting karena hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat setiap tahun, (b) menjadi bahan penyusunan rencana anggaran dalam hal perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun, serta (c) sebagai alat tata kelola administrasi BMN. Selain itu, penatausahaan BMN merupakan salah satu bagian yang menjadi bahan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tergambar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) (Rahman, 2017). Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan penatausahaan barang milik negara, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Abuzayan, Whyte, dan Bell (2014) menyatakan bahwa ada suatu tantangan besar di dalam penerapan pengelolaan barang milik negara atau aset publik. Sistem pengelolaan aset memerlukan perhatian penuh terhadap variabel-variabel terkait seperti sumber daya finansial, keahlian sumber daya manusia, strategi organisasi, dan software aplikasi serta suatu komitmen untuk menerapkan faktor-faktor tersebut secara terstruktur dan juga perhatian terhadap tantangan yang ada (Abuzayan, et al, 2014). Setiap organisasi mulai mengakui bahwa pendekatan strategis manajemen aset menjadi sumber daya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan keberlangsungan hidup jangka panjang organisasi (Gavrikova, Volkova, dan Burda, 2020).

Salah satu hal yang paling mencolok pada sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah faktor sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar perusahaan melihat bahwa faktor manusia merupakan hal yang penting dalam memberikan keunggulan dalam bersaing (Vipraprastha & Sari, 2016). SDM adalah salah satu modal utama untuk meningkatkan keuntungan dalam perusahaan (Rahayu & Suputra, 2019). Syiah & Banda (2014) menyatakan bahwa SDM dalam hal pemerintahan biasanya disebut sebagai aparatur negara. Pada sebuah artikel oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) yang ditulis oleh Kharismawan pada tahun 2013 (Syiah & Banda, 2014) disebutkan bahwa pengelola aset atau barang milik negara tingkat Satuan Kerja atau pengelola operator SIMAK saat ini bukan hanya sebatas operator biasa. Operator juga dapat dikatakan sebagai manajer aset, dimana operator harus dapat mengidentifikasi dan menciptakan keputusan dalam mengambil kebijakan yang tepat terkait penatausahaan BMN.

Penelitian Satiari dan Yadnyana (2020) memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan motivasi berpengaruh pada efektivitas SIMAK BMN. Jenjang pendidikan seorang pegawai memperlihatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Dari segi pendidikan dapat dilihat kualitas seseorang dapat meningkat ke berbagai aspek, sebab orang yang berpendidikan akan memiliki pemikiran dan tindakan yang lebih rasional serta cepat memahami tugas dan tanggungjawabnya. Persepsi terkait manfaat dari pendidikan yang diperoleh oleh operator SIMAK BMN dapat membantu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya serta semakin efektif operator dalam mengoperasikan SIMAK BMN.

Meskipun telah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dan kekuatan hukum pada pengelolaan barang milik negara, masih banyak ditemui permasalahan dan kesulitan yang menghambat pengelolaan barang milik negara pada pelaksanaan di lapangan. Salah satu permasalahannya yaitu pada kegiatan penatausahaan barang milik negara. Para operator SIMAK BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat masih banyak yang belum memahami aturan penatausahaan barang milik negara, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 06/Tahun 2016. Sebagai pelaksana teknis di dalam penatausahaan Barang Milik Negara, operator SIMAK BMN penting untuk memahami aturan tersebut agar penatausahaan barang milik negara terlaksana dengan baik serta laporan barang milik negara yang dihasilkan andal dan akuntabel.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Operator SIMAK BMN terhadap Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menguraikan fenomena yang diteliti serta menjelaskan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) yang diteliti (Iskandar, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Operator SIMAK BMN yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Kantor Wilayah membawahi 26

satuan kerja Permasalahatan yang terdiri dari Lembaga Permasalahatan, Rumah Tahanan Negara dan Balai Permasalahatan dan dua satuan tugas penatausahaan BMN. Pada Kantor Wilayah, terdapat empat orang Operator SIMAK BMN yang masing-masing bertanggung jawab atas penatausahaan BMN Setjen, Divisi PAS, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016). Jadi, di dalam penelitian ini semua populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 32 orang. Di dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah data primer. Data diperoleh langsung dari informan penelitian yaitu seluruh Operator SIMAK BMN yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Sumatera Barat dalam bentuk kuisisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Silang (*Crosstabs*) Pemahaman

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pemahaman

Proporsi responden berdasarkan jenis kelamin dan pemahaman dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pemahaman

Tingkat Pemahaman	Jenis Kelamin				Total	%
	Perempuan	%	Laki-Laki	%		
0-19 (Tidak Paham)	2	12,5	12	25	14	37,5
20-38 (Paham)	6	37,5	12	25	18	62,5
Total	8	50	24	50	32	100

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan 37,5% dengan kategori paham lebih banyak dari laki-laki 25%.

Apabila *Pearson Chi-Square* menampilkan hasil kurang dari atau sama dengan 0,05 maka ada hubungan antara baris dengan kolom atau ada perbedaan nilai baris jika dilihat dari nilai kolom. Berdasarkan analisis data *crosstabs* jenis kelamin dan pemahaman, diperoleh *Pearson Chi-Square* sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemahaman, atau dapat diartikan bahwa ada perbedaan pemahaman jika dilihat dari jenis kelamin.

Responden Berdasarkan Umur dan Pemahaman

Proporsi responden berdasarkan umur dan pemahaman dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Responden Berdasarkan Umur dan Pemahaman

Umur	Tingkat Pemahaman				Total	%
	0 - 19 (Tidak Paham)	%	20 - 38 (Paham)	%		
< 20	0	0	0	0	0	0
20 - 25	6	18,7	1	3,1	7	21,8
25 - 30	6	18,7	9	28,2	15	46,9
30 - 35	2	6,3	8	25	10	31,3
Total	14	43,7	18	56,3	32	100

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 32 orang responden, sebagian besar responden (46,9 %) berumur 25 – 30 tahun, di mana jumlah responden dengan kategori paham lebih banyak yaitu sebesar 28,2 %.

Berdasarkan analisis crosstabs umur dan pemahaman, diperoleh *Pearson Chi-Square* sebesar 0,04. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara umur dengan pemahaman, atau dapat diartikan bahwa ada perbedaan pemahaman jika dilihat dari umur.

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pemahaman

Proporsi responden berdasarkan tingkat pendidikan dan pemahaman dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Responden Berdasarkan Pendidikan dan Pemahaman

Pendidikan Terakhir	0 – 19		20 - 38		Total	%
	(Tidak Paham)	%	(Paham)	%		
SLTA	12	37,6	6	18,8	18	56,4
Diploma	0	0	1	3,1	1	3,1
Sarjana 1	2	6,3	11	34,3	13	40,6
Sarjana 2	0	0	0	0	0	0
Total	14	43,7	18	56,3	32	100

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 32 orang responden, sebagian besar responden (56,4 %) adalah SMA dan pemahaman yang lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang lain ada pada responden dengan tingkat pendidikan Sarjana 1 (S1) sebesar 40,6 %.

Responden Berdasarkan Rentang Masa Kerja dan Pemahaman

Proporsi responden berdasarkan masa kerja dan pemahaman dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Responden Berdasarkan Rentang Masa Kerja dan Pemahaman

Rentang Masa Kerja (Tahun)	Tingkat Pemahaman				Total	%
	0 – 19		20 - 38			
	(Tidak Paham)	%	(Paham)	%		
0 – 1	6	18,7	3	9,4	9	28,1
1 – 2	5	15,7	1	3,1	6	18,8
2 – 3	1	3,1	10	31,2	11	34,3
3 - 4	0	0	2	6,3	2	6,3
>4	2	6,2	2	6,3	4	12,5
Total	14	43,7	18	56,3	32	100

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa dari 32 orang responden, sebagian besar responden (31,2%) memiliki rentang masa kerja antara 2-3 tahun dengan pemahaman yang lebih tinggi daripada rentang masa kerja yang lain.

Responden Berdasarkan Jumlah Pelatihan Aset dan Pemahaman

Proporsi responden berdasarkan jumlah pelatihan aset dan pemahaman dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Responden Berdasarkan Jadwal Pelatihan Aset dan Pemahaman

Jumlah Pelatihan	Tingkat Pemahaman				Total	%
	0 – 19 (Tidak Paham)	%	20 - 38 (Paham)	%		
0	12	37,5	7	21,9	19	59,4
1	1	3,1	9	28,1	10	31,2
2	1	3,1	2	6,3	3	9,4
3	0	0	0	0	0	0
Total	14	43,7	18	56,3	32	100

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 32 orang responden, sebagian besar responden (28,1%) yang telah mengikuti pelatihan aset lebih memahami penatausahaan aset tetap dari pada responden yang tidak pernah mengikuti pelatihan.

Analisis Regresi Logistik Pemahaman

Nagelkerke R Square

Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,565. Hal ini mengindikasikan bahwa 56,5% perubahan pemahaman dijelaskan oleh jenis kelamin, umur, masa kerja, pendidikan, dan jumlah kali pelatihan. Sedangkan 43,5% ditentukan oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Nilai Nagelkerke R Square dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Nagelkerke R Square

Model Summary		
-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
26,352 ^a	,421	,565

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Koefisien Regresi Logistik

Tabel 7. Koefisien Regresi Logistik

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
St	JKL	2,080	1,622	1,646	1	,200	8,008
ep	RUM	1,930	,955	4,084	1	,043	6,889
1 ^a	TKP	,822	,567	2,100	1	,147	2,276
	MSK	,903	,767	1,386	1	,239	2,467
	JLP	-2,527	1,598	2,500	1	,114	,080
	Constant	-8,088	3,321	5,932	1	,015	,000

a. Variable(s) entered on step 1: JKL, RUM, TKP, MSK, JLP.

Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan bahwa dari lima faktor yang dianalisis yaitu jenis kelamin, umur, masa kerja, pendidikan, dan jumlah kali pelatihan, hanya faktor umur yang mempengaruhi pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Kategori Pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara

Untuk mengukur pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara, dilakukan tabulasi data terlebih dahulu melalui program *Microsoft Excel*. Selanjutnya diperoleh nilai, jumlah jawaban benar masing-masing responden, dan nilai total keseluruhan responden. Ketentuan atas tabulasi ini adalah bahwa jawaban benar akan diberi nilai 1 dan jawaban salah akan diberi nilai 0.

Nilai rata-rata pemahaman berdasarkan jumlah soal di kuisioner, bisa diperoleh dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Pemahaman} & & \text{Jumlah soal} \\ \text{rata-rata} & = & \frac{\text{di kuisioner}}{2 \text{ kategori}} \\ \\ \text{Pemahaman} & = & \frac{38}{2} \\ \text{rata-rata} & & \\ \\ \text{Pemahaman} & = & 19 \\ \text{rata-rata} & & \end{aligned}$$

Untuk menentukan pemahaman rata-rata keseluruhan Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara, bisa diperoleh melalui rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pemahaman rata-rata keseluruhan} & & \text{Jumlah jawaban benar} \\ \text{Operator SIMAK BMN} & = & \frac{\text{Jumlah responden}}{\text{Jumlah responden}} \\ \\ \text{Pemahaman rata-rata keseluruhan} & & 644 \\ \text{Operator SIMAK BMN} & = & \frac{32}{20,125} \\ \\ \text{Pemahaman rata-rata keseluruhan} & = & 20,125 \\ \text{Operator SIMAK BMN} & & \end{aligned}$$

Berdasarkan data di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman rata-rata keseluruhan Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara berada pada kategori Paham (P) dengan nilai 20,125 dengan kategori penuh 38 atau dengan persentase 52,97% yang artinya pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara di atas 50%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, hanya faktor umur yang mempengaruhi pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Hal ini senada dengan hasil analisis *crosstabs* bahwa ada hubungan antara umur responden Operator SIMAK BMN dengan pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara. Hasil ini sejalan dengan penelitian Liza (2018) yang menyimpulkan bahwa faktor umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Tingkat pemahaman rata-rata keseluruhan Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara berada pada kategori Paham (P) dengan nilai 20,125.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase operator SIMAK BMN yang memahami penatausahaan aset tidak jauh berbeda dengan jumlah operator yang belum memahaminya. Hal ini tidak terlepas dari fakta di lapangan bahwa sebagian besar operator merupakan lulusan SMA/SMK dan belum mendapatkan pelatihan mengenai penatausahaan barang milik negara

sehingga mereka kurang memahami PMK Nomor 181/PMK.06/Tahun 2016 tersebut. Masa kerja sebagai operator juga relatif singkat karena sering terjadinya pergantian operator oleh satuan kerja. Kantor Wilayah dapat memberikan lebih banyak program pelatihan kepada operator untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap penatausahaan aset seperti ditunjukkan pada hasil penelitian Satiari dan Yadnyana (2020) bahwa pelatihan akan meningkatkan efektivitas SIMAK BMN.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara menurut PMK Nomor 181/PMK 06/Tahun 2016. Pergantian operator sebaiknya tidak sering dilakukan karena dibutuhkan adaptasi dalam pekerjaan dan ketelatenan yang terus menerus untuk dapat menguasai penatausahaan BMN sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Operator SIMAK BMN Mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah sebagai berikut : 1) Secara keseluruhan pemahaman Operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara berada dalam kategori paham. Artinya, para operator memahami penatausahaan barang milik negara menurut PMK Nomor 181/PMK 06/Tahun 2016. 2) Dari semua faktor yang dianalisis yaitu jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, masa kerja dan jumlah pelatihan, hanya faktor umur yang mempengaruhi pemahaman operator SIMAK BMN mengenai penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyazan, Kayis MA; Whyte, Andrew, dan Bell, Joyce. (2014). *Asset-management framework(s) for infrastructure facilities in adverse (post-conflict/disaster-zone/high-alert) conditions*. Procedia Economics and Finance.
- Gavrikova, Elizaveta; Volkova, Erina; dan Burda, Yegor. (2020). *Strategic Aspects of Asset Management: An Overview of Current Research*. Sustainability Journal Volume 20.
- Indarwati, Dewi. (2019). "Evaluasi Kinerja Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Polda DIY". Tesis Magister Manajemen STIE WIDYA WIWAHA Yogyakarta.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kaganova, O., & McKellar, J. (2006). *Managing Government Property Assets: International Experiences: The Urban Insitute*.

- Liza, Citra. (2018). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang Mengenai Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Dinas Kota Padang". Tesis Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
- Ngwira, Marawi Makalanga; Parsa, Ali; dan Manase, David. (2012). "Effectiveness of Property Asset Management in Scottish Councils". *Journal of Corporate Real Estate*, Vol. 14 No. 2, pp. 105-120
- Rahayu. Putu Maya Fransisca dan I Dewa Gede Dharma Suputra. (2019). "Pengaruh Penggunaan SIA Dan TI Terhadap Kinerja Individual Dengan Kemampuan Teknik Pemakai Sebagai Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26:1-29.
- Rahman, Aulia. (2017). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja dalam Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat". Tesis Magister Akuntansi Universitas Andalas.
- Rizky, Harumi Puspa dan Setiawan, Doddy. (2019). "Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol.8, No.2, p94-116
- Sabario, Rozayuti dan Jaya, Hendry. (2017). "Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Pelaporan Aset". *Measurement : Journal of the Accounting Study Program*, Vol.11, No.1, hal 11-25.
- Santoso, Joko. 2010. "Pengaruh Ruang Lingkup Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Risiko Fiskal. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satiari, Ni Putu Ayu Ista dan Yadnyana, I Ketut. (2020). "Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Manusia pada Efektivitas SIMAK BMN". *E-Jurnal Akuntansi (E.JA) Universitas Udayana*, Vol.30, No.3, hal 699-712.
- Sugiyono. (2016). "Metode Penelitian Kombinasi". Jakarta: Alfabeta.
- Vipraprastha, Tiksnayana dan Maria M. Ratna Sari. (2016). "Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Individual Karyawan Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi." (4):1826-55.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
- . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.